

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
RUU Perampasan Aset

BUKU

Fuady, M. (2009). *Sejarah Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Gilissen, J., & Gorle, F. (2009). *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Adita Utama.

Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.(2019)

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. 1953.

Yunus Husein, Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.

ARTIKEL

Ibrahim, jonaedi E. dan J. (2021). *METODE PENELITIAN HUKUM normatif daan empiris*. PRENADAMEDIA GROUP.

Soerjono Soekanto. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.* (Cetakan ke). Rajawali Pers.

Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.20). Rineka Cipta.

Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

JOURNAL

Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022: korupsi lintas trias politika*. Indonesia Corruption Watch. Hlm

Ashady, S., Dudy, A. A., Nirmala, A. Z., & Rahmania, N. (2023). *PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN METODE PARALLEL*

- INVESTIGATION. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(2), 137-144.
- Ayuningsih, Irma Reisalinda; NELSON, Febby Mutiara. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia. Jurnal Ius Constituendum, 2022.
- Baswir, R. (2002). Dinamika Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Struktural. Jurnal Universitas Paramadina, 2(1), 25–34.
- Budi, R. (2023). Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(1), 45-60.
- Dwi Putra, R., Stevany Putri Sinlae, E., Suhaila Syafa, T., Fatika Syahda, I., Siswajanthi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. (2024). *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1).
- Elsera Yozani, R. (n.d.). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*.
- Fuadi, Gumilang; PUTRI, Windy Virdinia; RAHARJO, Trisno. Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2024.
- Klitgaard, R. (1998). Strategies against corruption. Presentation at Agencia Española de Cooperación Internacional Foro Iberoamericano Sobre El Combate a La Corrupción, Santa Cruz de La Sierra, Jun, 15–16.
- Latifah, Marfuatul. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2016.
- Lestiyana, E. S. (2020). Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Journal Of Criminal Law*, 1.
- Sari, L. (2023). Kedaulatan Negara dan Kuasa Kehakiman dalam Penegakan Hukum. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(2), hlm 123-138.
- Shalihah, F., & Adhayanto, O. (2017). Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial). *Fiat Justisia*, 10(4).
- Sofhian. Subhan. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1).
- Wirjono, P. (1986). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT. Eresco.
- Wiryawan, A. P. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pdananya, 1–5.

WEBSITE

Atmasasmita, R. (2024). *Revolusi dengan Hukum Mungkinkah?* SINDOnews. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/1442065/18/revolusi-dengan-hukum-mungkinkah-1724483316>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022) <https://sumbar.bpk.go.id/temuan-bpk-ri-ada-potensi-kerugian-negara-hingga-rp-17-t/>

- Bappenas. (2022). Laporan Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia. <https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-Indonesia>
- BPS. (2024, February 21). *Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. <https://ntt.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdwSFJHRjRVVkJqWIRWRU9EQkhNVFY0UjB4VVVUMDkjMw==/jumlah-tenaga-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur--2023.html?year=2023>
- Hielmy. (2024) <https://graduate.uinjkt.ac.id/id/teliti-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-terhadap-pelaku-korupsi-perspektif-maqid-al-sharah-ibn-shr-irfan-hielmy-raih-gelar-magister-ke-2728>
- ICW, (2022) Kupas Data: Kerugian Negara akibat Korupsi Tembus Rp230 Triliun dalam Sedekade <https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade>
- Malaka, T. (1948). *Hukum Revolusi*. Retrieved from <https://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1948-HukumRevolusi.htm>
- Nurdin, S., & Nasution, S. (2024, January 31). *Miris, Selama Empat Tahun Desa di Merangin Jambi Tidak Dialiri Listrik*. Viva News & Insight. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1682743-miris-selama-empat-tahun-desa-di-merangin-jambi-tidak-dialiri-listrik?page=2>
- Sumantri, I. K. (2024). *Revolusionisasi Hukum ala Mr Iwa Kusuma Sumantri*. Hukumonline. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/revolusionisasi-hukum-ala-mr-iwa-kusuma-sumantri-lt4ef93fd1c6713/>
- SPF. (2023, Juli 3). Singapore Government Agency Website. <https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-Staff-Departments/Commercial-Affairs-Department>
- Stephanie, W. (2023, December 1). *Fokus Pembangunan Pendidikan 2024: Perluasan Wajib Belajar dan Bantuan Pendidikan*. Kemendikbud RI. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/fokus-pembangunan-pendidikan-2024-perluasan-wajib-belajar-dan-bantuan-pendidikan>
- Transparency International. (2021). Indeks Persepsi Korupsi 2021. Retrieved from [https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/nzl]
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Corruption & Economic Crime*. United Nation. <https://dataunodc.un.org/dp-crime-corruption-offences>